



Representasi G30S dalam Buku Teks Sejarah SMA Kurikulum 1994 Terbitan Erlangga Edisi Kedua: Analisis Wacana Kritis Roger Fowler

Alvina Cherisa Damayanti,^{1*} Yuliati¹

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang,
Indonesia

Email: alvina.cherisa.2207316@students.um.ac.id, yuliati.fis@um.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 20-03-2026, Revised: 20-05-2026, Accepted: 24-05-2026, Published: 31-05-2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi narasi peristiwa G30S yang selama era Orde Baru disajikan secara tunggal dan cenderung memojokkan PKI melalui berbagai media, termasuk buku teks sejarah, sehingga menimbulkan dugaan adanya muatan ideologis dan kepentingan politik dalam penyusunannya meskipun penerbitnya adalah perusahaan swasta. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana representasi G30S dalam buku teks “Sejarah Nasional Indonesia dan Umum: Untuk SMU Kelas 3” terbitan Erlangga karya Badrika pada tahun 1997 dengan meninjau aspek kosakata, tata bahasa, representasi aktor dan peristiwa, serta ideologi yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengungkap konstruksi wacana dan kepentingan di balik narasi G30S. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis model Roger Fowler yang berfokus pada analisis bahasa sebagai praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kosakata serta struktur kalimat tertentu membentuk citra negatif terhadap PKI dan citra positif militer, sekaligus membatasi perspektif pembaca. Selain itu, peristiwa G30S direpresentasikan secara linear dengan PKI sebagai aktor utama dan militer sebagai penyelamat, tanpa menghadirkan kompleksitas sejarah. Wacana tersebut juga mengandung ideologi Orde Baru yang menekankan legitimasi kekuasaan dan penanaman nilai Pancasila. Kesimpulannya, buku teks tersebut tidak netral, melainkan merupakan produk wacana yang sarat kepentingan politik dan ideologis, sehingga mempengaruhi konstruksi pemahaman sejarah peserta didik.

Kata Kunci:

buku teks; G30S; wacana

Abstract

This study was motivated by the controversy surrounding the narrative of the September 30th Movement (G30S), which during the New Order era was presented in a one-sided manner and tended to vilify the Indonesian Communist Party (PKI) through various media, including history textbooks, thereby raising suspicions of ideological bias and political interests in their compilation, even though the publisher was a private company. Therefore, this study was conducted to analyze how the G30S is represented in the textbook “*Sejarah Nasional Indonesia dan Umum: Untuk SMU Kelas 3*,” published by Erlangga and authored by Badrika in 1997, by examining aspects of vocabulary, grammar, the representation of actors and events, as well as the ideology embedded within it. This aims to uncover the discourse constructions and interests behind the G30S narrative. The method used is qualitative research employing Roger Fowler’s Critical Discourse Analysis model, which focuses on language analysis as a social practice. The results indicate that the use of specific vocabulary

and sentence structures creates a negative image of the PKI and a positive image of the military, while simultaneously limiting the reader's perspective. Furthermore, the G30S events are represented in a linear manner, with the PKI as the primary actor and the military as the savior, without presenting the historical complexities. This discourse also contains New Order ideology that emphasizes the legitimacy of power and the instillation of Pancasila values. In conclusion, the textbook is not neutral but rather a product of discourse.

Keywords:

discourse; G30S; textbook



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Sejarah kelam perjalanan Bangsa Indonesia menempatkan G30S sebagai salah satu peristiwa yang sangat kontroversial. Dimana telah terjadi upaya penghilangan nyawa secara berencana terhadap 6 jenderal besar TNI Angkatan Darat Indonesia pada Kamis malam tanggal 30 September 1965 (Notosusanto et al., 2019). Menurut John Roosa (2008), sasaran utama dalam peristiwa tersebut ditujukan kepada sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Jenderal Achmad Yani, Jenderal A.H. Nasution, Letjen Suprpto, Letjen S. Parman, Letjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Panjaitan, serta Mayjen Sutoyo. Mereka menjadi target operasi yang berkaitan dengan aksi penculikan dan penyerangan pada malam peristiwa G30S. Namun, dari keseluruhan target tersebut, tidak semua mengalami nasib yang sama. Sebagian besar perwira yang menjadi sasaran akhirnya terbunuh dalam peristiwa tersebut, sedangkan Jenderal A.H. Nasution berhasil menyelamatkan diri.

Penjelasan mengenai peristiwa ini juga dikemukakan oleh John Roosa (2008) dalam kajiannya mengenai G30S. Adanya peristiwa kelam ini tentunya membuat pemerintah gencar untuk mencari dalang dibalik dalih penghilangan nyawa para jenderal besar Indonesia. Saat itu, narasi tunggal pemberitaan yang beredar memojokkan PKI sebagai dalang dari peristiwa G30S (Zanynu, 2019). Bahkan terkesan menjamur hingga era kepemimpinan Presiden Soeharto. Narasi resmi pemerintah pada saat itu menyatakan bahwa peristiwa G30S merupakan kudeta yang dilakukan oleh PKI (Ahmad, 2016). Peristiwa G30S dikemas dalam narasi tunggal sehingga istilah G30S/PKI melekat di masyarakat (Adam, 2007). Imbuan istilah "PKI" muncul dari perkembangan narasi G30S dan menjadi bentuk penegasan bahwa PKI dianggap sebagai dalang pada saat itu (Widiatmoko & Awaludin, 2017). Narasi tersebut dilegitimasi melalui berbagai media, seperti buku teks sejarah maupun film propaganda (Ahmad, 2016). Pada hakikatnya, penulisan buku teks sejarah di Indonesia dilakukan di bawah naungan pemerintah dengan berkolaborasi bersama sejumlah pakar sejarah sebagai upaya penjagaan standar isi, standar kompetensi lulusan, kebenaran ilmu, dan tujuan pendidikan nasional (Muslich, 2010). Syahputra & Mahdiana (2019) berpendapat bahwa narasi sejarah yang dikembagakan oleh pemerintah dalam buku teks, berperan penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan pada peserta didik.

Pendapat tersebut justru berkebalikan dengan pernyataan Sari (2021), yang menegaskan bahwa penyusunan buku teks sering dikaitkan sebagai hasil produk politik yang dihasilkan oleh pemerintah dan sarat akan kepentingan ideologis. Artinya, tidak menutup kemungkinan jika pemerintah turut andil di dalam penyajian

materi dalam buku teks sejarah seperti pemilihan peristiwa, penekanan narasi, penggunaan istilah tertentu, dan penghilangan fakta yang mencerminkan relasi kuasa dan ideologi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa buku teks sejarah bukan sekadar media pembelajaran yang bersifat netral, melainkan dapat menjadi instrumen produksi dan reproduksi ideologi tertentu. Narasi sejarah yang disusun melalui pilihan kosakata, struktur kalimat, penempatan aktor, serta penonjolan maupun penghilangan fakta tertentu berpotensi membentuk cara pandang peserta didik terhadap suatu peristiwa sejarah. Dalam konteks G30S, dominasi narasi resmi negara selama era Orde Baru menyebabkan hadirnya pemahaman sejarah yang cenderung tunggal dan hegemonik. Akibatnya, peserta didik tidak memperoleh ruang yang cukup untuk memahami kompleksitas peristiwa G30S secara kritis dan multiperspektif. Kondisi inilah yang menjadikan buku teks sejarah penting untuk dikaji secara kritis, terutama pada periode ketika kontrol negara terhadap pendidikan dan produksi pengetahuan berada pada posisi yang sangat kuat.

Kebijakan dalam mengatur penyajian materi pada buku teks termuat dalam kurikulum nasional, sehingga penerbit-penerbit buku harus menyesuaikan dengan kurikulum tersebut agar produksinya dapat digunakan di sekolah (Budiono & Awaludin, 2017). Penerbit Erlangga merupakan salah satu penerbit buku teks swasta terbesar yang berdiri sejak tahun 1952. Artinya, penerbit ini turut menjadi saksi dinamika perubahan kurikulum dari era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto. Dilansir dari laman resminya, pada tahun 1970 Penerbit Erlangga menunjukkan kesuksesannya dalam menerbitkan buku teks pembelajaran seperti; sejarah umum, kimia, dan IPA serta buku-buku perkuliahan. Produksi tersebut terus berkembang pada tahun 1990-an hingga mampu menjangkau sekolah-sekolah nasional di Indonesia dengan skala yang cukup luas. Di samping memberikan keuntungan material pada pihak penerbit, kemajuan perkembangan produksi buku teks yang dapat tersebar secara meluas tentunya juga membawa dampak bagi pemahaman peserta didik. Apalagi ketika Penerbit Erlangga mencapai puncak kejayaannya ketika mampu memproduksi buku teks edisi-edisi terbaru dengan kualitas yang lebih baik, sesuai dengan kurikulum yang dianut saat itu yaitu Kurikulum 1994.

Karakteristik utama Kurikulum 1994 adalah adanya sistem terpusat yang menekankan pendidikan moral, pembangunan, dan loyalitas kepada negara (Tilaar, 1995). Sehingga, sebagai bagian dari produk pengembangan Kurikulum 1994, buku teks sejarah saat itu pastinya juga mengandung nilai-nilai penekanan yang serupa. Kondisi tersebut seyogyanya harus dihindari, karena berpotensi menimbulkan penciptaan narasi dalam buku teks sejarah bersifat tunggal yang cenderung memihak kepada kepentingan rezim (Tati, 2015). Sayangnya, McGregor (2007), berpendapat bahwa narasi sejarah seputar G30S yang termuat dalam buku teks adalah bagian dari hasil produk pemerintah Orde Baru. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa materi sejarah dalam buku teks tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik dan ideologi penguasa pada masanya.

Penelitian mengenai narasi sejarah kontroversial Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, terutama yang menyoroti peristiwa G30S. Diantaranya ialah, penelitian oleh Riyandanu (2020) yang berfokus pada analisis narasi G30S dalam buku sejarah Indonesia kelas XII kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud, penulis menggunakan pendekatan analisis wacana kritis guna melihat konstruksi bahasa dan ideologi di dalam teks. Sementara itu, penelitian ini mengkaji buku teks

yang berlandaskan Kurikulum 1994 serta dibuat pada masa Orde Baru sehingga narasi G30S di dalamnya cenderung dipengaruhi kepentingan ideologis rezim saat itu, berbeda dengan buku Kurikulum 2013 yang disusun pada era reformasi dengan narasi yang lebih terbuka terhadap berbagai interpretasi sejarah. Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Filasari & Ayundasari (2020) mengkaji wacana Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam buku ajar Sejarah Indonesia Kurikulum 2013 tingkat SMA. Kajian tersebut menerapkan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Roger Fowler dan rekan-rekannya untuk menelaah kandungan ideologis yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa dalam buku teks sejarah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilihan kosakata dan struktur kalimat dalam buku teks mampu membangun wacana tertentu, terutama dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan karakter kepada peserta didik. Selain itu, dikuatkan dengan makalah milik Taum (2014) yang membahas hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan konstruksi wacana G30S dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menempatkan buku pelajaran sejarah bukan semata-mata sebagai alat penyampaian materi pembelajaran, melainkan juga sebagai medium yang berperan dalam membangun pola pikir serta menanamkan ideologi melalui penggunaan bahasa. Oleh karena itu, model Roger Fowler dipilih karena dianggap mampu menganalisis bagaimana kosakata, tata bahasa, representasi aktor, dan penyusunan peristiwa dalam narasi G30S digunakan untuk mengungkap ideologi yang terkandung dalam buku teks sejarah (Fowler et al., 2018). Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikemukakan oleh Roger Fowler, bahasa dipahami tidak sekadar sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk praktik sosial yang sarat dengan muatan ideologi dan kepentingan tertentu (Fowler, 2020; Fowler et al., 2018; Fowler, 2013). Pilihan kosakata dan tata bahasa di dalam teks dapat merepresentasikan relasi kuasa dan kepentingan tertentu (Eriyanto, 2001). Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana narasi G30S dikonstruksikan, pihak mana yang dimunculkan atau dimarginalkan, serta ideologi apa yang berusaha dipertahankan melalui buku teks sejarah tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian mengenai narasi G30S dalam buku pelajaran sejarah SMA Kurikulum 1994 terbitan Erlangga edisi kedua melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis masih belum banyak dilakukan dan menyisakan ruang kajian yang perlu dikembangkan. Pada kenyataannya, buku tersebut lahir dan berkembang pada masa dominasi ideologi Orde Baru yang sangat kuat dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis representasi G30S dalam buku teks sejarah SMA Kurikulum 1994 terbitan Erlangga edisi kedua. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penggunaan kosakata dan tata bahasa dalam merepresentasikan peristiwa G30S, menganalisis representasi peristiwa serta aktor-aktor yang terlibat, dan mengungkap ideologi serta kepentingan yang terkandung dalam wacana G30S pada buku teks sejarah SMA Kurikulum 1994 terbitan Erlangga edisi kedua berdasarkan analisis wacana kritis model Roger Fowler.

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan dengan menghadirkan perspektif baru dalam kajian historiografi buku pelajaran sejarah di Indonesia, pembentukan narasi G30S dalam buku teks Kurikulum 1994, serta penggunaan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) pada teks-teks pendidikan.

Serta dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana relasi kuasa, politik, dan ideologi dikonstruksikan melalui penggunaan kosakata dan tata bahasa dalam penulisan sejarah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara stabilitas politik nasional, kebijakan pendidikan, dan objektivitas penulisan sejarah. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan ilmiah, acuan konseptual, dan tambahan literatur bagi peneliti maupun kalangan akademik yang ingin mengkaji topik serupa di kemudian hari, terutama terkait kajian pendidikan sejarah, Analisis Wacana Kritis, serta keterkaitan antara kekuasaan politik dan konstruksi pengetahuan sejarah.

Secara praktis, urgensi penelitian ini terletak pada upaya meningkatkan kesadaran kritis terhadap narasi sejarah dalam buku teks, sehingga pembelajaran sejarah tidak hanya dipahami sebagai hafalan peristiwa, tetapi juga sebagai proses memahami konstruksi pengetahuan, ideologi, dan kekuasaan yang melatarbelakanginya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan bagi penyusun buku pelajaran dan perancang kurikulum untuk lebih cermat dalam menghadirkan materi sejarah yang berimbang, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, serta tidak mengabaikan unsur ideologi yang terkandung di dalamnya. Bagi guru sejarah, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam menggunakan buku teks secara lebih kritis dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan literasi sejarah masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan pendidikan dalam merumuskan kurikulum dan evaluasi buku teks sejarah, agar pendidikan sejarah tidak hanya menjadi alat legitimasi politik, tetapi juga sarana pembentukan warga negara yang kritis, demokratis, dan berkesadaran sejarah.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Roger Fowler (Fowler, 1997). Metode dan pendekatan tersebut dipilih untuk membuktikan suatu wacana pada buku *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum: Untuk SMU Kelas 3* karya Badrika (1997) yang menunjukkan adanya pengaruh politik terhadap konstruksi narasi peristiwa Gerakan 30 September (G30S) melalui penggunaan kosakata serta tata bahasa sebagai bagian dari interaksi sosial yang tidak bersifat netral. Metode tersebut memungkinkan peneliti menafsirkan makna, ideologi, serta relasi kekuasaan yang tersirat di balik teks dan wacana sosial yang dikonstruksikan (Creswell, 2016; Moleong, 2019). Menurut Eriyanto (2011), model analisis Roger Fowler digunakan untuk melihat bagaimana unsur-unsur kebahasaan dalam teks dapat mencerminkan keberpihakan, kekuasaan, maupun kepentingan ideologis tertentu. Berdasarkan hal tersebut, model analisis Roger Fowler dipandang relevan dalam penelitian ini karena mampu mengungkap bagaimana ideologi dan kepentingan politik bergerak secara implisit dalam suatu wacana sejarah (Eriyanto, 2011). Sumber data penelitian diperoleh dari teks yang membahas peristiwa G30S dalam buku sejarah SMA Kurikulum 1994 terbitan Erlangga edisi kedua. Selain itu, data penunjang seperti sumber tertulis didapatkan melalui studi kepustakaan, dengan fokus kepada penelitian terdahulu yang membahas sejarah G30S, politik Orde Baru, buku pelajaran sejarah, dan teori Analisis Wacana Kritis model Roger Fowler. Praktik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian teks yang memuat narasi tentang G30S, kemudian mengelompokkan data berdasarkan penggunaan kosakata, bentuk

kalimat, serta tata bahasa dalam penyampaian informasi pada teks. Peneliti selanjutnya menafsirkan bagaimana pilihan bahasa tersebut merepresentasikan pihak tertentu secara positif maupun negatif, serta bagaimana wacana yang dibangun mendukung ideologi politik Orde Baru. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan representasi dalam buku teks dengan sumber-sumber sejarah dan kajian akademik lain untuk melihat adanya kecenderungan konstruksi sejarah yang dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Kosakata & Tata Bahasa dalam Representasi G30S dalam Buku Teks

Roger Fowler mengungkapkan model analisis wacana kritis terhadap suatu bacaan dengan mempertimbangkan struktur serta fungsi bahasa (Fowler, 2020). Beliau menyatakan jika dengan meninjau kosakata dan tata bahasa, seseorang akan mampu mengetahui praktik ideologi di dalam suatu bacaan (Eriyanto, 2011). Kosakata dapat berperan untuk membatasi pandangan pembaca, artinya sebuah narasi yang menutup kemungkinan pembaca untuk berpikir kritis serta mengarahkan pembaca pada makna yang tunggal (Yamin, 2020). Hal seperti ini dapat dilihat pada penyusunan kalimat yang ada pada substansi bahasan buku teks karangan Badrika (1997), halaman 37 yang menyebutkan;

“Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas, bahwa setiap partai komunis di mana pun ia berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainnya...Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan seperti yang berlangsung di berbagai negara lain, tidak terkecuali di Indonesia.”

Pemakaian kalimat tersebut, memberikan kesan kebenaran yang mutlak tanpa membuka ruang pembaca untuk melihat lebih luas peristiwa yang terjadi. Kosakata tersebut juga muncul pada paragraf lain, seperti; “...PKI pernah mencoba untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia yang sah, yaitu tahun 1948...”. Penulis merangkai kalimat tersebut guna untuk mengarahkan pembaca pada satu sudut pandang mengenai negara yang sah dan PKI sebagai pihak lainnya.

Kosakata juga dapat digunakan sebagai bentuk marginalisasi terhadap individu maupun kelompok tertentu melalui pemilihan bahasa yang digunakan dalam suatu teks. Menurut Roger Fowler, kata-kata tidak dipandang sebagai unsur bahasa yang bersifat netral, melainkan memiliki muatan makna serta implikasi ideologis tertentu. Oleh karena itu, pemilihan kosakata dapat mempengaruhi cara pembaca memahami suatu peristiwa sekaligus membentuk penilaian terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini, bahasa dapat digunakan untuk menonjolkan, melemahkan, atau bahkan meminggirkan kelompok tertentu sesuai dengan sudut pandang yang ingin dibangun dalam teks. Pandangan tersebut juga dijelaskan oleh Eriyanto (2011), yang menegaskan bahwa penggunaan kosakata memiliki kaitan erat dengan pembentukan makna dan ideologi dalam suatu wacana. Dapat dibuktikan pada perbandingan kalimat dalam merepresentasikan PKI pada halaman 38.

“Sebagai pimpinan atas gerakan PKI itu, Letnan Kolonel Untung mengambil suatu keputusan dan memerintahkan kepada seluruh anggota gerakan PKI untuk siap dan mulai bergerak... mereka mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama

Angkatan Darat. Para perwira Angkatan Darat disiksa dan selanjutnya dibunuh.”

Serta representasi TNI pada halaman 41: “Operasi penumpasan terhadap G 30 S/PKI dilancarkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Sebagai langkah awal, Mayor Jenderal Soeharto mengadakan musyawarah... Dalam musyawarah tersebut dibahas upaya-upaya untuk menumpas G 30 S/PKI.”

Penggunaan kata “pembunuhan” dan “penumpasan” menunjukkan adanya upaya membangun opini publik melalui pilihan bahasa tertentu. Kedua istilah tersebut tidak hanya digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa, tetapi juga mempengaruhi cara pembaca memahami serta menilai pihak-pihak yang terlibat. Pemilihan kosakata tersebut berfungsi memperkuat membenaran terhadap kelompok tertentu sekaligus membentuk citra negatif terhadap pihak lain, sehingga secara tidak langsung menciptakan keberpihakan dalam penyampaian informasi. Kalimat yang mengandung marginalisasi juga terlihat pada kalimat lain, seperti; “cara kekerasan”; “merebut kekuasaan”; “melenyapkan lawan-lawan politik”; “menyusupkan”, yang memiliki indikasi untuk mendelegitimasi PKI sebagai ancaman negara.

Roger Fowler, mengungkapkan bahwa kosakata dapat bersifat klasifikasi yang artinya menarasikan suatu peristiwa yang sama dengan pemilihan kata yang berbeda (Eriyanto, 2011). Kosakata klasifikasi tersebut terlihat pada kalimat berikut;

“Setelah RRI dan kantor pusat telekomunikasi dikuasai kembali, Mayor Jenderal Soeharto selaku pimpinan sementara Angkatan Darat memberitahukan kepada seluruh rakyat bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 telah terjadi peristiwa penculikan terhadap beberapa perwira tinggi Angkatan Darat yang dilakukan oleh golongan kontra revolusi yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.”

Penulis menyebutkan “golongan kontra revolusi” yang bertujuan menyederhanakan realitas sejarah. Kata-kata bermakna klasifikasi juga muncul pada halaman lainnya, seperti “PKI membuat fitnah”; “Operasi penumpasan”; “kaum pemberontak”, sehingga penulis membatasi interpretasi serta menyederhanakan peristiwa yang kompleks menjadi narasi yang mengklasifikasikan pihak benar dan pihak salah.

Roger Fowler, membagi menjadi tiga konsep penting dalam tata bahasa, yaitu kalimat transitif, intransitif, serta relasional (Eriyanto, 2011). Kalimat transitif merupakan kalimat yang menjelaskan bagian dari sebab serta bagian dari akibat. Pada buku teks ditemukan kalimat: “Pada saat usia Republik Indonesia masih muda, PKI pernah mencoba untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia yang sah, yaitu tahun 1948. Gerakan PKI itu dikenal dengan nama Pemberontakan Madiun.” Pada kalimat “PKI mencoba merebut kekuasaan”, berfungsi menonjolkan bahwa PKI sebagai pelaku utama digambarkan dengan tindakan agresif.

Selain itu, kalimat intransitif adalah bentuk kalimat yang menunjukkan hubungan antara pelaku dengan suatu aktivitas, keadaan, atau proses tanpa menghadirkan objek maupun penjelasan akibat tindakan tersebut. Dalam penggunaan kalimat intransitif, fokus utama terletak pada tindakan yang dilakukan aktor, sementara sasaran ataupun dampaknya tidak dijelaskan secara rinci. Menurut Eriyanto (2011), pemakaian kalimat intransitif dapat memengaruhi pemahaman pembaca terhadap suatu peristiwa karena informasi yang disampaikan cenderung terbatas, sehingga konsekuensi tindakan tidak terlihat jelas. Contoh kalimat yang berada dalam buku teks, adalah; “Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas

berkat kerjasama ABRI dan rakyat yang setia pada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.”. Kalimat tersebut merupakan kalimat pasif yang pelakunya tidak disebutkan secara langsung. Dengan demikian, tata bahasa serta kosakata yang digunakan secara implisit menjadi alat untuk membangun wacana dominan Orde Baru tentang G30S sebagai pengkhianatan. Kemudian kalimat relasional digunakan untuk membentuk identitas moral dan ideologis (Eriyanto, 2011). Contoh pada buku teks ialah, “Pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas berkat kerja sama ABRI dan rakyat yang setia pada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.”, pada kalimat tersebut PKI identik disebutkan dengan “pemberontakan”, sedangkan rakyat dikaitkan dengan “setia pada Pancasila”. Sehingga pemilihan kata tersebut dapat membentuk identitas moral dan ideologi para pembaca.

Peristiwa & Representasi Aktor G30S dalam Buku Teks

Buku teks karangan Badrika (1997) merepresentasikan peristiwa G30S sebagai rangkaian kejadian kronologis yang memiliki alur sebab-akibat yang jelas. Rangkaian peristiwa tersebut digambarkan bermula dari bangkitnya kembali PKI setelah tahun 1948, yang kemudian berkembang semakin kuat hingga mencapai puncaknya pada tahun 1965. Dalam narasi tersebut, perkembangan PKI dikaitkan dengan peran kepemimpinan D.N. Aidit beserta keberadaan Biro Khusus yang disebut memiliki keterlibatan dalam penyusunan rencana gerakan. Rencana tersebut diwujudkan melalui tindakan penghilang nyawa terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat yang kemudian menjadi bagian penting dalam peristiwa G30S. Dapat dilihat dari Badrika (1997), pada halaman 37 bagian doktrin komunis dan Pemberontakan Madiun menyebutkan bahwa,

“Dalam doktrin komunis telah dinyatakan dengan jelas, bahwa setiap partai komunis di mana pun ia berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainnya. Hal ini ditempuh dalam rangka menegakkan “diktator proletariat”. Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan seperti yang berlangsung di berbagai negara lain, tidak terkecuali di Indonesia. Pada saat usia Republik Indonesia masih muda, PKI pernah mencoba untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia yang sah, yaitu tahun 1948. Gerakan PKI itu dikenal dengan nama Pemberontakan Madiun.”

Narasi tersebut menyebutkan bahwa PKI memanfaatkan kondisi negara yang sedang rentan untuk merebut kekuasaan. Melalui penjelasan mengenai "doktrin komunis", penulis menciptakan kesan menakutkan dengan pilihan diksi seperti "menyingkirkan kekuatan politik lain" dan "cara kekerasan", sementara dinamika politik yang lebih kompleks tidak dibahas secara rinci. Sehingga menutup ruang diskusi bagi pembaca untuk melihat strategi politik lain yang mungkin dimiliki PKI saat itu.

Dengan demikian, narasi yang dibangun cenderung menegaskan adanya kebenaran tunggal bahwa G30S merupakan gerakan terencana PKI yang berhasil digagalkan oleh militer. Peristiwa G30S dalam buku teks sejarah karangan Badrika (1997) direpresentasikan melalui sudut pandang yang menempatkan PKI sebagai aktor utama sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindakan kekerasan dan ancaman terhadap negara. Pada kalimat yang mengandung kosakata marginalisasi pada buku teks karangan Badrika (1997), menyebutkan;

“Para perwira Angkatan Darat disiksa dan selanjutnya dibunuh Mereka dibawa ke Lubang Buaya, yaitu sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan pangkalan udara utama Halim Perdana Kusuma, dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, lalu ditimbun dengan sampah dan tanah.”

Pada kalimat tersebut dijelaskan secara detail dengan pilihan bahasa yang dramatis, seperti “disiksa” dan “dibunuh”, sehingga membangun citra PKI sebagai kelompok brutal, tidak manusiawi, dan anti-Pancasila. PKI digambarkan sebagai kelompok yang melakukan “pemberontakan”, “pengkhianatan”, serta upaya “merebut kekuasaan negara” melalui cara-cara kekerasan dan konspiratif. Selain itu, pada kalimat lain PKI juga direpresentasikan sebagai pihak yang menjalankan operasi rahasia melalui “biro khusus”, “pertemuan rahasia”, dan upaya “menyusupkan kader” ke berbagai lembaga negara. Dengan cara tersebut, teks secara konsisten mengarahkan pembaca untuk melihat PKI sebagai ancaman nasional sekaligus dalang utama di balik peristiwa G30S.

Sebaliknya, ABRI direpresentasikan sebagai kekuatan penyelamat bangsa dan penjaga ideologi negara. Hal tersebut terlihat melalui kalimat berikut: “Pada pukul 19.15 WIB, Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Sarwo Edhi Wibowo telah berhasil merebut kembali gedung RRI Pusat dan gedung telekomunikasi yang sebelumnya dikuasai kaum pemberontak.” Pada kalimat “merebut kembali gedung RRI”, ABRI digambarkan sebagai aktor heroik yang berhasil memulihkan keamanan nasional. Pada kalimat lain juga disebutkan narasi seperti, “membebaskan Pangkalan Udara Halim”, dan “mengamankan serta membersihkan daerah Lubang Buaya”. Narasi tersebut diperkuat dengan penyebutan bahwa keberhasilan menumpas G30S/PKI terjadi berkat “kesetiaan rakyat dan ABRI kepada Pancasila”, sehingga menempatkan militer sebagai pihak yang benar, sah, dan memperoleh legitimasi moral. Selain itu, masyarakat juga direpresentasikan mendukung tindakan ABRI melalui pembentukan Front Pancasila dan demonstrasi menuntut pembubaran PKI. Dengan cara ini, buku teks membangun klasifikasi antara PKI sebagai musuh negara dan ABRI bersama rakyat sebagai pembela negara.

Soeharto ditampilkan sebagai pemimpin yang tegas, dipercaya rakyat, dan mampu menyelamatkan bangsa dari krisis politik. Melalui kalimat seperti, “Dengan kepercayaan masyarakat inilah, Mayor Jenderal Soeharto mengambil sikap tegas terhadap pemberontak PKI.”, tercipta citra Soeharto sebagai tokoh penyelamat dan pemimpin sah dalam masa transisi kekuasaan, didukung oleh kalimat relasional berikut, “Supersemar merupakan tonggak sejarah serta kemenangan strategis pertama dari perjuangan Orde Baru yang hendak digalang melalui proses konstitusional.” Sebaliknya, Presiden Soekarno direpresentasikan secara negatif sebagai pemimpin yang tidak mampu mengatasi krisis bangsa dan kehilangan kepercayaan rakyat. Narasi pada buku teks menyebutkan,

“Pengakuan secara sah dari Pemerintah Orde Lama yang mempunyai legalitas formal, tidak berwibawa, serta tidak mampu lagi mengatasi krisis bangsa Indonesia di segala bidang. Kemudian, secara de facto dan de jure Pemerintah Orde Lama menyerahkan tugas-tugas kepada Soeharto dalam rangka menanggulangi krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat itu.”

Kalimat tersebut menunjukkan adanya delegitimasi terhadap Orde Lama. Dengan demikian, representasi aktor dalam buku teks tidak bersifat netral, melainkan membentuk citra bahwa Orde Baru dan Soeharto adalah penyelamat

bangsa, sedangkan PKI dan Orde Lama menjadi sumber kekacauan politik di Indonesia.

Sebaliknya, dalam artikel karya Adam (2018) ditunjukkan adanya berbagai versi mengenai dalang peristiwa tersebut, mulai dari keterlibatan PKI, konflik internal Angkatan Darat, peran Soekarno, hingga kemungkinan campur tangan pihak asing. Berdasarkan pernyataan tersebut maka, peristiwa G30S dipahami bukan sebagai kejadian yang sederhana dan tunggal, melainkan peristiwa kompleks yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. Dalam segi cakupan peristiwa, buku teks tersebut berhenti pada keberhasilan penumpasan gerakan dalam rentang waktu 1-3 Oktober 1965 serta gejolak masyarakat menuntut Tritura sehingga fokusnya terbatas. Berbeda dengan narasi yang disebutkan oleh Adam (2018), yang menyebutkan adanya dampak jangka panjang seperti pembunuhan massal, penahanan, eksil, serta stigma sosial terhadap korban dan keluarganya. Oleh karena itu, peristiwa G30S tidak hanya dipahami sebagai konflik militer, tetapi juga tragedi kemanusiaan dan politik yang berkepanjangan.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa narasi dalam buku teks karangan Badrika (1997) merepresentasikan peristiwa sejarah yang bersifat dominan dan cenderung mengikuti pola narasi resmi Orde Baru. Sebaliknya, Adam (2018) menghadirkan pendekatan historiografis yang lebih kritis, plural, dan reflektif terhadap narasi sejarah. Seyogyanya Badrika dapat menyajikan narasi serupa dengan Adam yang lebih kritis serta mencakup peristiwa secara lengkap. Akan tetapi, dilihat dari tahun terbit buku Badrika yang bertepatan dengan masa Orde Baru, maka dapat dipahami jika narasinya belum bersifat multiperspektif seperti milik Adam. Mengingat pada era Orde Baru narasi sejarah seputar peristiwa G30S cenderung bersifat tunggal karena mengikuti kepentingan pemerintah pusat yang sedang berkuasa. Buku teks karangan Badrika (1997), menyebutkan terdapat dua aktor dibalik peristiwa G30S. Menurut Kuntowijoyo (2013), pelaku sejarah adalah individu yang terlibat langsung dalam dinamika dan peristiwa sejarah. Apabila mencermati buku teks Badrika (1997), tokoh PKI ditempatkan sebagai aktor utama sekaligus dalang peristiwa G30S. Sementara Soeharto muncul sebagai figur yang mengambil alih situasi dan berhasil menumpas gerakan tersebut dalam waktu singkat.

Menurut Roger Fowler, kosakata dapat berfungsi sebagai bentuk klasifikasi dalam bahasa, yaitu bagaimana suatu peristiwa atau realitas yang sama dijelaskan melalui penggunaan kata-kata berbeda. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Eriyanto (2011), bahwa klasifikasi terjadi karena realitas yang kompleks sehingga penulis menyederhanakannya dan membuka celah untuk mengontrol informasi. Seperti pada halaman 41 yang menyebutkan: "Pengepungan-engepungan terhadap pasukan G 30 S/PKI terus dilakukan....Dalam waktu singkat pengkhianatan G 30 S/PKI berhasil dipatahkan berkat lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan rakyat, dan ABRI kepada Pancasila."

Pada paragraf tersebut, penulis menyebutkan "pengkhianatan G30S/PKI" serta "pasukan G30S/PKI" yang memiliki framing ideologis bermakna negatif serta sebagai kekuatan militer. Dari kalimat tersebut dapat diketahui bahwa PKI digambarkan sebagai aktor antagonis serta menciptakan citra baik bagi ABRI. Kalimat tersebut menggambarkan militer sebagai aktor yang aktif, kuat, serta mampu mengendalikan situasi. Sedangkan kalimat intransitif merupakan jenis kalimat yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan suatu tindakan tanpa

disertai penjelasan mengenai objek maupun akibatnya. Menurut Eriyanto (2011), penggunaan kalimat intransitif dapat memengaruhi cara pembaca memahami suatu peristiwa karena informasi yang disampaikan menjadi lebih terbatas. Kalimat tersebut dapat mengaburkan detail penting, terutama dampak dari tindakan militer sehingga narasi terasa lebih netral dan objektif. Namun dibanding netral dan objektif, penulis lebih berhati-hati serta selektif memilih kata. Dengan demikian, tata bahasa serta kosakata yang digunakan secara implisit menjadi alat untuk membangun wacana dominan Orde Baru tentang G30S sebagai pengkhianatan serta militer sebagai penyelamat negara.

Ideologi & Kepentingan yang Terkandung dalam Wacana G30S Pada Buku Teks

Guna memahami makna ideologi dan kepentingan yang terkandung dalam wacana G30S pada buku teks sejarah karangan Badrika (1997), maka diperlukan pemahaman mengenai karakteristik pemerintahan Indonesia pada masa penerbitan buku tersebut, yaitu era Orde Baru. Penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru mengadopsi Pancasila sebagai orientasi ideologinya (Aurora, 2024). Pemerintah Orde Baru tetap menempatkan Pancasila dalam posisi utama pada kenegaraan, hal tersebut dapat diketahui dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1975. Meski demikian, pemerintah juga menghendaki adanya penyederhanaan terhadap pemahaman serta perumusan nilai-nilai Pancasila agar lebih mudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Melalui kondisi tersebut, pendidikan tidak semata-mata berperan sebagai wahana pembelajaran, melainkan juga dijadikan alat untuk menanamkan ideologi serta membentuk cara pandang masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Adapun maksud penyederhanaan Pancasila saat itu adalah untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma sederhana yang mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia (Retnowati, 2018). Selain itu, penerapan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru juga dilatarbelakangi oleh riwayat peristiwa G30S yang saat itu dipercayai sebagai upaya kudeta dari Partai Komunis Indonesia. Sehingga pemerintah berupaya menghapus aliran komunis di Indonesia dan mengembalikan esensi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara (Duha, 2022).

Sebagai produk hasil terbitan masa Orde Baru, buku teks sejarah karangan Badrika (1997) juga disusun dengan mengacu pada ideologi yang diterapkan di Indonesia saat itu. Mengingat Danu (2021), berpendapat bahwa penyusunan buku teks pembelajaran tidak dapat terlepas dari muatan ideologi negara agar masyarakat memiliki nilai karakter sesuai harapan pemerintah. Kasus semacam ini terbukti apabila meninjau pernyataan dalam buku teks sejarah Badrika (1997) sebagaimana berikut; “Dalam waktu singkat pengkhianatan G30S/PKI berhasil dipatahkan berkat perlindungan Tuhan yang Maha Esa, kesetiaan rakyat, dan ABRI kepada Pancasila.” dan “Di samping itu, mereka juga menuntut agar tokoh-tokoh PKI diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia”. Dua kutipan tersebut menunjukkan jika ABRI dan rakyat yang tidak mengikuti PKI merupakan contoh yang sesuai dengan ideologi Pancasila. Hal ini berkebalikan dengan PKI yang berideologi komunis. Partai tersebut dinarasikan bertentangan dengan ideologi Pancasila sehingga harus diadili. Hal ini menunjukkan bahwa buku pelajaran sejarah yang diterbitkan pada era pemerintahan Orde Baru dimanfaatkan sebagai sarana untuk menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Selain itu,

hasil analisis menunjukkan adanya dominasi ideologi Orde Baru yang kuat dalam konstruksi narasi G30S. Seperti pada kalimat yang mengandung kosakata klasifikasi, “Dengan kata lain, Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, atau koreksi terhadap penyelewengan di masa lampau dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.”

Kosakata tersebut tampak melalui penggunaan bahasa yang menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang benar, sedangkan komunisme dan PKI direpresentasikan sebagai ancaman terhadap negara. Kalimat tersebut memperlihatkan bagaimana Orde Baru dikonstruksikan sebagai rezim yang hadir untuk memperbaiki keadaan bangsa setelah masa sebelumnya dianggap menyimpang. Dengan demikian, narasi sejarah dalam buku teks tidak hanya menjelaskan peristiwa, tetapi juga membawa kepentingan ideologis untuk membenarkan kekuasaan Orde Baru.

Di samping itu menurut Susanto et al. (2022), buku teks terkadang difungsikan sebagai sarana untuk mengungkapkan kepentingan pemerintah. Hal ini biasanya dilakukan agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh kepada pemerintah pusat, sehingga tidak ada gerakan perlawanan ataupun pemberontakan. Pada masa Orde Baru pemerintah pusat cenderung memfokuskan orientasinya pada kepentingan untuk memberantas PKI (Kuntoro & Sumarno, 2014; Syaputra & Sumarno 2021). Pemerintah Orde Baru memberikan legitimasi terhadap tindakan penumpasan kepada individu-individu yang diduga terlibat sebagai anggota PKI. Bahkan, karena pemerintah dan aparat belum mengetahui kepastian kebenarannya, terkadang orang awam yang bukan anggota PKI harus menjadi korbannya (Wardaya, 2010). Dalam konteks tersebut, buku teks sejarah juga berfungsi sebagai media legitimasi politik terhadap kepemimpinan Orde Baru dan pemerintahan Soeharto. Melalui kalimat relasional berikut, “Supersemar merupakan tonggak sejarah serta kemenangan strategis pertama dari perjuangan Orde Baru yang hendak digalang melalui proses konstitusional.” Supersemar direpresentasikan sebagai “tonggak sejarah”, “kemenangan strategis pertama”, serta langkah konstitusional yang menyelamatkan bangsa dari krisis nasional. Perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto direpresentasikan sebagai proses yang legitim, konstitusional, serta memperoleh dukungan dari masyarakat pada narasi tersebut. Dalam konteks ini, Soeharto diposisikan sebagai tokoh penyelamat bangsa yang mampu memulihkan stabilitas nasional, sedangkan Orde Baru direpresentasikan sebagai pemerintahan yang membawa pembangunan, ketertiban, dan penegakan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Tindakan pemerintah dan aparat dalam menumpas orang-orang yang dicurigai sebagai anggota PKI seyogyanya dilakukan setelah adanya bukti yang jelas. Lantaran jika orang yang tidak bersalah menjadi korban, maka akan melanggar HAM. Berangkat dari permasalahan inilah yang kemudian melatarbelakangi pemerintah Orde Baru untuk menarasikan kepentingannya pada buku teks sejarah karangan Badrika (1997). Merujuk pada buku teks tersebut diperoleh informasi jika penumpasan terhadap PKI memang terjadi, tetapi tidak ada narasi lengkap yang menjelaskan kronologi dan korban dari aksi tersebut. Padahal beberapa riset menyebutkan jika dampak dari aksi itu juga mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah (Roosa et al., 2004; Hidayat, 2025). Artinya narasi buku teks pada saat itu

memang ditujukan untuk kepentingan pemerintah, utamanya dalam menanamkan kepercayaan kepada masyarakat jika pemerintah tidak melakukan tindakan penyelewengan HAM dalam penumpasan PKI. Walaupun sejatinya pemerintah sudah melakukan tindakan yang melanggar HAM. Dengan demikian, buku teks sejarah tidak bersifat netral, melainkan menjadi sarana reproduksi ideologi negara pada masa Orde Baru. Melalui pemilihan kosakata, struktur kalimat, serta representasi aktor dan peristiwa, pembaca diarahkan untuk menerima satu sudut pandang tertentu, yaitu PKI sebagai musuh negara, ABRI dan Soeharto sebagai penyelamat bangsa, serta Orde Baru sebagai rezim yang sah dan ideal.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi peristiwa G30S dalam buku teks *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum: Untuk SMU Kelas 3* karya Badrika (1997) terbitan Erlangga tidak bersifat netral, melainkan memiliki muatan ideologis dan kepentingan politik rezim Orde Baru. Merujuk pada perspektif Roger Fowler dapat diketahui bahwa susunan bahasa dalam buku teks dibentuk untuk menghadirkan sudut pandang tertentu. Setiap kata dan susunan kalimat yang digunakan memiliki peran dalam membentuk cara pembaca memahami suatu peristiwa, tokoh, ataupun realitas sosial yang disampaikan dalam teks. Dari segi bahasa, pilihan kata seperti “pengkhianatan”, “pemberontak”, dan “penumpasan” berfungsi untuk memarginalkan PKI sekaligus membangun citra positif militer sebagai penyelamat negara. Dengan demikian, bahasa yang digunakan dalam buku teks secara tidak langsung menunjukkan adanya keberpihakan terhadap sudut pandang tertentu, sehingga memengaruhi cara pembaca menafsirkan informasi yang disajikan. Sedangkan dalam segi struktur kalimat, baik transitif maupun intransitif, juga digunakan untuk menonjolkan peran aktif militer dan mengaburkan dampak tindakan tertentu, sehingga memperkuat narasi dominan. Dalam hal representasi peristiwa dan aktor, G30S digambarkan sebagai peristiwa yang memiliki alur sebab-akibat tunggal dengan PKI sebagai dalang utama, sementara tokoh militer seperti Soeharto diposisikan sebagai figur penyelamat. Narasi ini cenderung mengabaikan kompleksitas sejarah dan menutup kemungkinan adanya perspektif lain. Selain itu, buku teks tersebut juga mencerminkan ideologi dan kepentingan pemerintah Orde Baru, khususnya dalam upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membangun legitimasi kekuasaan. Salah satu alat politik untuk membentuk kesadaran dan persepsi masyarakat ialah narasi yang disajikan dalam buku teks pendidikan, termasuk dengan menghilangkan atau meminimalkan pembahasan terkait pelanggaran HAM G30S. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buku teks sejarah tersebut merupakan produk wacana yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, sehingga penyajian sejarah menjadi tidak sepenuhnya objektif dan cenderung mengikuti narasi resmi pemerintah pada masanya.

Referensi

- Adam, A. W. (2007). *Seabad Kontroversi Sejarah*. Ombak.
- Adam, A. W. (2018). Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel: etudes interdisciplinaires sur le monde insulindien*, 95(-), 11-30. <https://doi.org/10.4000/archipel.604>.

- Ahmad, T. A. (2016). *Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Badrika, I. W. (1997). *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum: Untuk SMU Kelas 3*. Jakarta: Erlangga.
- Budiono, H., & Awaludin, A. F. (2017). Perkembangan Historiografi Buku Teks Sejarah Di Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi. *Efektor*. <https://doi.org/10.29407/e.v4i2.969>.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Terjemahan)*. Pustaka Pelajar.
- Danu, A. K., & Nesi, A. (2021). Ideologi dalam Wacana Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Terbitan Kemdikbud Edisi Revisi 2017. *JURNAL IDEAS: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 203-212. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.359>.
- Duha, A. M. (2022). Pancasila and Communis: An Ideological Comparison. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(2), 391-414. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i2.59807>.
- Eriyanto, E. (2011). *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media)*. LKiS Printing Cemerlang.
- Filasari, R. & Ayundasari, L. (2020). Wacana Penguatan Pendidikan Karakter dalam Buku Teks Sejarah Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9(2), 90-109. <https://doi.org/10.21009/JPS.092.01>.
- Fowler, R. (2020). Linguistic criticism. In *The Language and Literature Reader* (pp. 49-59). Routledge.
- Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., & Trew, T. (2018). Critical linguistics. In *Language and control* (pp. 185-213). Routledge.
- Fowler, R. (2013). *Language in the News: Discourse and Ideology in the Press*. Routledge.
- Fowler, R. (1997). Review of *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, by N. Fairclough. *Language in Society*, 26(3), 421-423. <http://www.jstor.org/stable/4168779>.
- Hidayat, M. M. (2025). "Saya Tidak Mau Mati Sia-Sia": Pengalaman Hidup Mantan Tahanan Politik 1965-1966 di Indonesia. *Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesia Journal of Indigenous Psychology*, 12(1), 177-199. <https://doi.org/10.24854/jpu1148>.
- Kuntowijoyo, K. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- McGregor, K. E. (2007). *History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past*. NUS Press.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. (2010). *Text Book Writing: Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks*. Ar-Ruzz Media.

- Notosusanto, N., Djamhari, S. A., Ariwiadi, Santoso, R., Wismar, E. B. M., & Marboun, M. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Pertiwi, H., Putri, S. H., Salwa, D. N., Ariandini, C., & Aurora, P. A. (2023). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Baru dan Era Reformasi. In *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi* (Vol. 4, No. 1, pp. 360-373).
- Retnowati, E. (2018). *Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila*. LIPI Press.
- Riyandanu, M. F. (2020). *Analisis Wacana Kritis Teks Gerakan 30 September Pada Buku Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas XII*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (2004). *Tahun yang tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- Saputra, D. T., & Sumarno, S. (2021). Pemberantasan PKI di Kediri (1966-1968). *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 10(2), 1-8. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/38738>.
- Sari, K. (2021). *Ideologi dan Kurikulum*. Cantrik Pustaka.
- Susanto, H., Fatmawati, S., & Fathurrahman, F. (2022). Analisis Pola Narasi Sejarah dalam Buku Teks Lintas Kurikulum di Indonesia. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 6(2), 228-243. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6632>.
- Syahputra, M. A. D. S., & Mahdiana, N. (2019). Analysis of History Textbooks Based on Benedict Anderson's Approach. *Historika*, 22. <https://doi.org/10.20961/historika.v22i2.37962>.
- Tati, A. (2015). Kurikulum Pendidikan di SD dan SMA Pada Masa Orde Baru. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 89-102. <https://doi.org/10.21009/JPS.042.09>.
- Taum, Y. Y. (2014). Bahasa, Wacana, dan Kekuasaan dalam Konstruksi G30S. In *International Seminar Language Maintenance and Shift IV*. Universitas Diponegoro.
- Tilaar, H. A. R. (1995). *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995 (Suatu Analisis Kebijakan)*. Grasindo.
- Wardaya, M. K. (2010). Keadilan Bagi yang Berbeda Paham: Rekonsiliasi dan Keadilan Bagi Korban Tragedi 1965. *Jurnal Mimbar Hukum*, 22(1), 96-113. <https://doi.org/10.22146/jmh.16211>.
- Widiatmoko, S., & Awaludin, A. F. (2017). Pemaknaan Ulang Terhadap Peringatantrage di Nasional 65 dan Upaya Rekonsiliasi di Tingkat Daerah. *Efektor*, 4(2), 49-56. <https://doi.org/10.29407/e.v4i2.971>.
- Widyawati, D., Nindiati, D. S., & Syafarudin, N. (2025). Analisis Nilai-Nilai Dalam Isu Sejarah Kontroversi Pada Buku Teks Sejarah Kelas XII Kurikulum

Merdeka. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 6(2), 473-479.
<https://doi.org/10.55583/jkip.v6i2.1371>.

Yamin, M. (2020). *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Ar-Ruzz Media.

Zanynu, M. A. (2019). Soeharto dan Gerakan 30 September (G30S) dalam Narasi Memori Media Berita Daring Indonesia. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 27-43. <https://doi.org/10.33376/ik.v4i1.287>.